



R E N J A

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palangka Raya, November 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 17 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 19 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 23 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 30 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 31 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 31 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 31 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 33 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 41 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 50 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode Tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2023, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 21.845.492.424,-** (Dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 21.779.463.424,-** (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 66.029.000,-** (Enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Dana APBD Provinsi

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Relisasi Keuangan | | Realisasi Fisik |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | | Rp | % | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 21.605.492.424 | 19.973.395.465 | 92,45 | 95,00 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 181.907.000 | 179.217.600 | 98,52 | 100,00 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 51.095.556 | 48.450.300 | 94,82 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 50.811.444 | 50.787.300 | 99,95 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 40.000.000 | 39.980.000 | 99,95 | 100,00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.013.537.180 | 8.737.735.472 | 87,26 | 100,00 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.995.287.180 | 8.719.584.472 | 87,24 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.873.000 | 10.796.000 | 99,29 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.377.000 | 7.355.000 | 99,70 | 100,00 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 80.000.000 | 73.477.400 | 100,00 | 100,00 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 79.500.000 | 73.477.400 | 91,85 | 95,00 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 547.097.400 | 538.218.250 | 98,38 | 100,00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.265.000 | 10.250.000 | 99,85 | 100,00 |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Relisasi Keuangan | | Realisasi Fisik |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | | Rp | % | (%) |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 97.984.000 | 90.577.000 | 92,44 | 100,00 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 24.598.000 | 24.590.000 | 99,97 | 100,00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000 | 9.000.000 | 90,00 | 100,00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 19.990.000 | 99,95 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 283.145.400 | 282.869.000 | 99,90 | 100,00 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD | 101.105.000 | 100.942.250 | 99,84 | 100,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.660.450.844 | 10.344.858.513 | 97,04 | 100,00 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000 | 4.992.000 | 99,84 | 100,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 238.498.844 | 187.145.135 | 78,47 | 100,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10.416.952.000 | 10.152.721.378 | 97,46 | 100,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 120.000.000 | 99.888.230 | 83,24 | 100,00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 90.000.000 | 73.198.230 | 81,33 | 100,00 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.000.000 | 26.690.000 | 88,97 | 100,00 |
| 2. | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 240.000.000 | 238.233.500 | 99,26 | 100,00 |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 174.250.000 | 173.519.500 | 99,58 | 100,00 |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 78.500.000 | 78.233.000 | 99,66 | 100,00 |
| | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 15.750.000 | 15.386.000 | 97,69 | 100,00 |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 78.000.000 | 77.900.500 | 99,87 | 100,00 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 65.750.000 | 64.714.000 | 98,42 | 100,00 |
| | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 15.000.000 | 14.870.000 | 99,13 | 100,00 |
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 50.750.000 | 49.844.000 | 98,21 | 100,00 |
| | JUMLAH | 21.845.492.424 | 20.211.628.965 | 92,52 | 95,00 |

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2021 khususnya yang bersumber dari dana APBD untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **92,52%** (Sembilan puluh dua koma lima puluh dua persen) dan Prosentase fisik mencapai **95,00 %** (Sembilan puluh lima persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.632.096.959,-** (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau **7,55 %** (tujuh koma lima puluh lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.689.400,-** (Dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau **1,48 %** (satu koma empat puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.275.801.708,-** (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau **12,74 %** (dua belas koma tujuh puluh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.500.000,-** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau **100 %** (seratus persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 6.552.600,-** (Enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau **8,15 %** (delapan koma lima belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 8.879.150,-** (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atau **1,62 %** (satu koma enam puluh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 315.592.331,-** (Tiga ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) atau **2,98%** (dua koma sembilan puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 20.111.770,-** (Dua puluh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau **16,76 %** (enam belas koma tujuh puluh enam persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.766.500,-** (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau **0,74 %** (nol koma tujuh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 730.500,-** (Tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah) atau **0,42 %** (nol koma empat puluh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.036.000,-** (Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) atau **1,58 %** (satu koma lima puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|-----------------|---|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase keterlaksanaan | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan program kerja SOPD | 10 dokumen | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 2 dokumen | 2 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Penyusunan RKA SOPD | 5 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 dokumen | - | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 | 6 dokumen | 6 dokumen | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|---------------------|--|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS Satpol PP Provinsi Kalteng | 5 tahun | - | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1 tahun | 1 tahun | 20 |
| 1.05.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan keuangan akhir tahun SOPD | 5 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan realisasi keuangan semesteran | 10 dokumen | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 2 dokumen | 2 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik | 5 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | - | | | | | | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|---------------------|--|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 250 orang | - | 50 orang | 50 orang | 100 | 50 orang | 50 orang | 20 |
| 1.05.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 250 orang | - | 50 orang | 50 orang | 100 | 50 orang | 50 orang | 20 |
| 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/ penerangan | 25 jenis | - | 5 jenis | 5 jenis | 100 | 5 jenis | 5 jenis | 20 |
| 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor | 30 jenis | - | 6 jenis | 6 jenis | 100 | 6 jenis | 6 jenis | 20 |
| 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cetak dan penggandaan | 35 jenis | - | 7 jenis | 7 jenis | 100 | 7 jenis | 7 jenis | 20 |
| 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bacaan koran bagi pegawai | 15 jenis | - | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 3 jenis | 3 jenis | 20 |
| 1.05.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makanan dan minuman bagi tamu kantor | 100 jenis | - | 20 jenis | 20 jenis | 100 | 20 jenis | 20 jenis | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|---------------------|---|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah | 5 tahun | - | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1 tahun | 1 tahun | 20 |
| 1.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD | Media informasi online Satpol PP Provinsi Kalteng yang up to date | 5 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 20 |
| 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat menyurat dan pembelian materai | 500 surat/paket | - | 100 surat/paket | 100 surat/paket | 100 | 100 surat/paket | 100 surat/paket | 20 |
| 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Listrik, telepon dan jaringan internet | 15 rekening | - | 3 rekening | 3 rekening | 100 | 3 rekening | 3 rekening | 20 |
| 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa pengelola administrasi keuangan dan Gaji Tenaga Kontrak | 10 jenis | - | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 2 jenis | 2 jenis | 20 |
| 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas/operasional | 120 unit | - | 20 unit | 20 unit | 100 | 20 unit | 20 unit | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|---------------------|---|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Service peralatan kantor | 34 jenis | - | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 3 jenis | 3 jenis | 20 |
| 1.05.02 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.02.1.01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini, serta terlaksananya pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan | 70 Kab/Kota | - | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 100 | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|-----------------|--|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, unjuk rasa dan kerusuhan massa | 70 Kab/Kota | - | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 100 | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 20 |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Sistem keamanan lingkungan dan deteksi dini kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas dan bencana | 5 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 20 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah | 20 kegiatan | - | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 20 |
| 1.05.02.1.02 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | 100% | - | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022 | |
|-----------------|--|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD 2021 | Realisasi Renja PD 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7) | 11=(10/4) |
| 1.05.02.1.02 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani | 100% | - | | | | | | |
| 1.05.02.1.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Pengawasan kepatuhan pelaksanaan penegakan Perda dan Pergub | 70 Kab/Kota | - | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 100 | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 20 |
| 1.05.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 70 Kab/Kota | - | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 100 | 14 Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 20 |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disampaikan beberapa program dan kegiatan yang mendukung kinerja pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain sebagai berikut yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan, antara lain :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN (THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Lingkungan Internal.**
 - a) Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;
 - 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;
 - 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai ;
 - 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kalimantan Tengah ;
 - 6) Terjalannya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif ;
 - 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.
- b) Kelemahan (Weakness).
- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/ Protap Tentang Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;
 - 3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional lapangan Trantibum ;
 - 4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap Tugas ;
 - 5) Anggota Polisi Pamong Praja masih ada yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;
 - 6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.
 - 8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;
- 3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenteram ;
- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasaangka mengambil keputusan ;
- 7) Terjadinya hubungan dengan aparaturnya POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
- 2) Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) ;
- 3) Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat ;
- 5) Lemahnya Koordinasi ;
- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat ;
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja ;
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota / lokasi tertentu ;
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa

identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesional.
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara Pemerintahan.
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
6. Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi Program penanganannya.
7. Perlu penataan kewenangan penanganan trantibum dan penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

e. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan

Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya

pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :

- a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
 - b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang dibebankan kepada personil Satpol PP.
2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal untuk lingkup Provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 197 orang, sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan memiliki anggota berjumlah 362 terdiri dari PNS 75 Orang dan Tenaga Kontrak 287 Orang personil Satpol PP.
 4. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur

Kalimantan Tengah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2023 adalah:

- Jumlah Program : 2 program.
- Jumlah Kegiatan : 9 kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan : 35 sub kegiatan.
- Pagu indikatif : Rp. 23.459.615.460,-.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi dengan target capaian tahun 2023 sebesar 100 %.

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan aspek indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani, target capaian 100 %.
2. Persentase Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani, target capaian 100 %.

Pagu Indikatif rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 OPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 12.709.410.193,- untuk kegiatan rutin (termasuk gaji Tenaga Kontrak), ditambah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 10.750.205.267,- sehingga total Pagu Indikatif rancangan awal RKPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 23.459.615.460,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan Rencana Kerja yang di buat tetap mengacu pada Program dan Kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Musrenbang, pikir dan usulan tokoh masyarakat).

Table 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.
6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

b. Sasaran

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.
- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Terlaksananya Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 5) Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.

- 6) Siapnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran tugas.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditunjang dengan Belanja Langsung, yaitu Belanja Operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa), dan Belanja Modal (Melanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.459.615.460,-

| A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | |
|---|---|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
| | f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. |
| | g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. |
| | c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. |
| | d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. |
| | e. Fasilitasi Kunjungan Tamu. |
| | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. |
| | g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. |

| | |
|--|---|
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan. |
| | b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. |
| | c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. |
| B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 7. | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |
| | a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. |
| | b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. |
| | c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi. |
| | d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. |
| | e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia. |
| | f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. |
| 8. | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur |
| | a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. |
| | b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. |
| | c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. |
| 9. | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi |
| | a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS |
| | b. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS. |

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 akan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output,

outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

**KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2021-2026**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN |
|--|--|--|----------------|
| Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat | Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | Persentase (%) |

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD selama Tahun Anggaran 2023. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, November 2022.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

| No | | Target SPM/Standar Nasional | Target IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | - | - | 7:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | 7:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | - |

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|--|----------------|--------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | 23,458,787,459 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | 25,769,000,000 | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | <i>Presentase Keterlaksanaan</i> | 100 | 22,612,787,459 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | <i>Presentase Keterlaksanaan</i> | 100 | 24,319,000,000 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu | 100 | 223,622,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu | 100 | 243,500,000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 40,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 45,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 20,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 22,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 15,125,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 16,500,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 20,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 25,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 18,537,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 20,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 dokumen | 39,960,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 dokumen | 40,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|----------------|--------------------------|---|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 dokumen | 70,000,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 dokumen | 75,000,000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu | 100 | 10,775,205,267 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu | 100 | 11,528,000,000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota P.Raya | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 72 orang | 10,750,205,267 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota P.Raya | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 74 orang | 11,500,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dokumen | 15,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dokumen | 15,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 2 dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 2 dokumen | 13,000,000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | 51,840,000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | 100,000,000 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota P.Raya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 80 stel | 51,840,000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota P.Raya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 80 stel | 100,000,000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 | 941,909,500 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 | 1,077,500,000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota P.Raya | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 jenis | 7,000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota P.Raya | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 jenis | 10,000,000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota P.Raya | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 jenis | 289,571,500 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota P.Raya | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 jenis | 300,000,000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota P.Raya | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 jenis | 70,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota P.Raya | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 jenis | 100,000,000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 jenis | 10,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 jenis | 12,500,000 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 dokumen | 30,000,000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 dokumen | 35,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 dokumen | 415,338,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 dokumen | 500,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------|---|------------------|---|----------------|--------------------------|---|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 120,000,000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 120,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 10,208,849,532 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 10,910,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 10,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 10,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 415,179,532 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 400,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 3 laporan | 9,783,670,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 3 laporan | 10,500,000,000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 411,361,160 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 460,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota P.Raya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 24 unit | 165,615,460 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota P.Raya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 24 unit | 175,000,000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota P.Raya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 jenis | 35,000,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 jenis | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 jenis | 35,000,000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Kota P.Raya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 5 gedung | 210,745,700 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Kota P.Raya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 5 gedung | 250,000,000 | |
| 2. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi | 100 | 846,000,000 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi | 100 | 1,450,000,000 | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | 100 | 512,000,000 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | 100 | 850,000,000 | |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Provinsi Kalteng | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 35 kasus | 53,000,000 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Provinsi Kalteng | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 35 kasus | 150,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|----------------|--------------------------|---|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Provinsi Kalteng | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 35 kasus | 54,000,000 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Provinsi Kalteng | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 35 kasus | 150,000,000 | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Provinsi Kalteng | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 1 dokumen | 93,000,000 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Provinsi Kalteng | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 1 dokumen | 150,000,000 | |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 dokumen | 200,000,000 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kota P.Raya | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 dokumen | 150,000,000 | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia | Kota P.Raya | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 100 orang | 100,000,000 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia | Kota P.Raya | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 100 orang | 150,000,000 | |
| | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 1 laporan | 12,000,000 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kota P.Raya | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 1 laporan | 100,000,000 | |
| | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani | 100 | 188,000,000 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani | 100 | 300,000,000 | |
| | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1 laporan | 92,000,000 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1 laporan | 100,000,000 | |
| | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1 laporan | 50,000,000 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1 laporan | 100,000,000 | |
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | 1 laporan | 46,000,000 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | 1 laporan | 100,000,000 | |
| | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina | 100 | 146,000,000 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina | 100 | 300,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------------|--|----------------|--------------------------|--|------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 1 laporan | 100,000,000 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Provinsi Kalteng | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 1 laporan | 150,000,000 | |
| | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Provinsi Kalteng | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif | 20 dokumen | 46,000,000 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Provinsi Kalteng | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif | 20 dokumen | 150,000,000 | |

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah
 (Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | |
| 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | 23,459,615,460 | | | | 25,819,000,000 |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Presentase Keterlaksanaan | | 100 | 22,613,615,460 | APBD | | 100 | 24,319,000,000 |
| 1.05.01.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu | | 100 | 224,450,001 | APBD | | 100 | 243,500,000 |
| 1.05.01.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota P.Raya | 2 dokumen | 40,828,001 | APBD | | 2 dokumen | 45,000,000 |
| 1.05.01.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 20,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 22,000,000 |
| 1.05.01.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 15,125,000 | APBD | | 1 dokumen | 16,500,000 |
| 1.05.01.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 20,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 25,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|-------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 18,537,000 | APBD | | 1 dokumen | 20,000,000 |
| 1.05.01.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota P.Raya | 6 dokumen | 39,960,000 | APBD | | 6 dokumen | 40,000,000 |
| 1.05.01.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Kota P.Raya | 1 dokumen | 70,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 75,000,000 |
| 1.05.01.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu | | 100 | 10,775,205,267 | APBD | | 100 | 11,528,000,000 |
| 1.05.01.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota P.Raya | 72 orang | 10,750,205,267 | APBD | | 74 orang | 11,500,000,000 |
| 1.05.01.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 15,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 15,000,000 |
| 1.05.01.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | Kota P.Raya | 2 dokumen | 10,000,000 | APBD | | 2 dokumen | 13,000,000 |
| 1.05.01.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | 100 | 51,840,000 | APBD | | 100 | 100,000,000 |
| 1.05.01.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Kota P.Raya | 80 stel | 51,840,000 | APBD | | 80 stel | 100,000,000 |
| 1.05.01.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | | 100 | 941,909,500 | APBD | | 100 | 1,077,500,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota P.Raya | 5 jenis | 7,000,000 | APBD | | 5 jenis | 10,000,000 |
| 1.05.01.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota P.Raya | 6 jenis | 289,571,500 | APBD | | 6 jenis | 300,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|-------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota P.Raya | 7 jenis | 70,000,000 | APBD | | 7 jenis | 100,000,000 |
| 1.05.01.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan | Kota P.Raya | 3 jenis | 10,000,000 | APBD | | 3 jenis | 12,500,000 |
| 1.05.01.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota P.Raya | 1 dokumen | 30,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 35,000,000 |
| 1.05.01.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Kalteng | 1 dokumen | 415,338,000 | APBD | | 1 dokumen | 500,000,000 |
| 1.05.01.06.11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 120,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 120,000,000 |
| 1.05.01.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100 | 10,208,849,532 | APBD | | 100 | 10,910,000,000 |
| 1.05.01.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota P.Raya | 1 laporan | 10,000,000 | APBD | | 1 laporan | 10,000,000 |
| 1.05.01.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota P.Raya | 3 laporan | 415,179,532 | APBD | | 3 laporan | 400,000,000 |
| 1.05.01.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | Kota P.Raya | 3 laporan | 9,783,670,000 | APBD | | 3 laporan | 10,500,000,000 |
| 1.05.01.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | | 100 | 411,361,160 | APBD | | 100 | 460,000,000 |
| 1.05.01.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Kota P.Raya | 24 unit | 165,615,460 | APBD | | 24 unit | 175,000,000 |
| 1.05.01.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kota P.Raya | 5 jenis | 35,000,000 | APBD | | 5 jenis | 35,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Kota P.Raya | 5 gedung | 210,745,700 | APBD | | 5 gedung | 250,000,000 |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi | | 100 | 846,000,000 | APBD | | 100 | 1,500,000,000 |
| 1.05.02.1.01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | | 100 | 512,000,000 | APBD | | 100 | 900,000,000 |
| 1.05.02.1.01.01 | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Provinsi Kalteng | 35 kasus | 53,000,000 | APBD | | 35 kasus | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.02 | Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Provinsi Kalteng | 35 kasus | 54,000,000 | APBD | | 35 kasus | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Provinsi Kalteng | 1 dokumen | 93,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.04 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kota P.Raya | 1 dokumen | 200,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 200,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.02.1.01.05 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kota P.Raya | 100 orang | 100,000,000 | APBD | | 100 orang | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.09 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | Kota P.Raya | 1 laporan | 12,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.02 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani | | 100 | 188,000,000 | APBD | | 100 | 300,000,000 |
| 1.05.02.1.02.01 | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 92,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.02.02 | Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 50,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.02.03 | Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 46,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.03 | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina | | 100 | 146,000,000 | APBD | | 100 | 300,000,000 |
| 1.05.02.1.03.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 100,000,000 | APBD | | 1 laporan | 150,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraaan Maju 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.02.1.03.02 | Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif | Provinsi Kalteng | 20 dokumen | 46,000,000 | APBD | | 20 dokumen | 150,000,000 |

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | |
| 1.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | 23,459,615,460 | | | | 25,819,000,000 |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Presentase Keterlaksanaan | | 100 | 22,613,615,460 | APBD | | 100 | 24,319,000,000 |
| 1.05.01.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu | | 100 | 224,450,001 | APBD | | 100 | 243,500,000 |
| 1.05.01.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota P.Raya | 2 dokumen | 40,828,001 | APBD | | 2 dokumen | 45,000,000 |
| 1.05.01.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 20,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 22,000,000 |
| 1.05.01.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 15,125,000 | APBD | | 1 dokumen | 16,500,000 |
| 1.05.01.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 20,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 25,000,000 |
| 1.05.01.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 18,537,000 | APBD | | 1 dokumen | 20,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|-------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota P.Raya | 6 dokumen | 39,960,000 | APBD | | 6 dokumen | 40,000,000 |
| 1.05.01.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Kota P.Raya | 1 dokumen | 70,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 75,000,000 |
| 1.05.01.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu | | 100 | 10,775,205,267 | APBD | | 100 | 11,528,000,000 |
| 1.05.01.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota P.Raya | 72 orang | 10,750,205,267 | APBD | | 74 orang | 11,500,000,000 |
| 1.05.01.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 15,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 15,000,000 |
| 1.05.01.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | Kota P.Raya | 2 dokumen | 10,000,000 | APBD | | 2 dokumen | 13,000,000 |
| 1.05.01.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | 100 | 51,840,000 | APBD | | 100 | 100,000,000 |
| 1.05.01.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Kota P.Raya | 80 stel | 51,840,000 | APBD | | 80 stel | 100,000,000 |
| 1.05.01.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | | 100 | 941,909,500 | APBD | | 100 | 1,077,500,000 |
| 1.05.01.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota P.Raya | 5 jenis | 7,000,000 | APBD | | 5 jenis | 10,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|-------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota P.Raya | 6 jenis | 289,571,500 | APBD | | 6 jenis | 300,000,000 |
| 1.05.01.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota P.Raya | 7 jenis | 70,000,000 | APBD | | 7 jenis | 100,000,000 |
| 1.05.01.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Kota P.Raya | 3 jenis | 10,000,000 | APBD | | 3 jenis | 12,500,000 |
| 1.05.01.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota P.Raya | 1 dokumen | 30,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 35,000,000 |
| 1.05.01.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Kalteng | 1 dokumen | 415,338,000 | APBD | | 1 dokumen | 500,000,000 |
| 1.05.01.06.11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota P.Raya | 1 dokumen | 120,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 120,000,000 |
| 1.05.01.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100 | 10,208,849,532 | APBD | | 100 | 10,910,000,000 |
| 1.05.01.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota P.Raya | 1 laporan | 10,000,000 | APBD | | 1 laporan | 10,000,000 |
| 1.05.01.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota P.Raya | 3 laporan | 415,179,532 | APBD | | 3 laporan | 400,000,000 |
| 1.05.01.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | Kota P.Raya | 3 laporan | 9,783,670,000 | APBD | | 3 laporan | 10,500,000,000 |
| 1.05.01.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | | 100 | 411,361,160 | APBD | | 100 | 460,000,000 |
| 1.05.01.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Kota P.Raya | 24 unit | 165,615,460 | APBD | | 24 unit | 175,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.01.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kota P.Raya | 5 jenis | 35,000,000 | APBD | | 5 jenis | 35,000,000 |
| 1.05.01.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Kota P.Raya | 5 gedung | 210,745,700 | APBD | | 5 gedung | 250,000,000 |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi | | 100 | 846,000,000 | APBD | | 100 | 1,500,000,000 |
| 1.05.02.1.01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | | 100 | 512,000,000 | APBD | | 100 | 900,000,000 |
| 1.05.02.1.01.01 | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Provinsi Kalteng | 35 kasus | 53,000,000 | APBD | | 35 kasus | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.02 | Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Provinsi Kalteng | 35 kasus | 54,000,000 | APBD | | 35 kasus | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Provinsi Kalteng | 1 dokumen | 93,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.04 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kota P.Raya | 1 dokumen | 200,000,000 | APBD | | 1 dokumen | 200,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.02.1.01.05 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kota P.Raya | 100 orang | 100,000,000 | APBD | | 100 orang | 150,000,000 |
| 1.05.02.1.01.09 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | Kota P.Raya | 1 laporan | 12,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.02 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani | | 100 | 188,000,000 | APBD | | 100 | 300,000,000 |
| 1.05.02.1.02.01 | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 92,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.02.02 | Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 50,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.02.03 | Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 46,000,000 | APBD | | 1 laporan | 100,000,000 |
| 1.05.02.1.03 | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina | | 100 | 146,000,000 | APBD | | 100 | 300,000,000 |
| 1.05.02.1.03.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | Provinsi Kalteng | 1 laporan | 100,000,000 | APBD | | 1 laporan | 150,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.05.02.1.03.02 | Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif | Provinsi Kalteng | 20 dokumen | 46,000,000 | APBD | | 20 dokumen | 150,000,000 |